



# **RISALAH**

**NOMOR 21 TAHUN 2018**

**RAPAT PARIPURNA KE - 21  
MASA SIDANG KE II  
TAHUN 2018**

## **TENTANG**

**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI – FRAKSI TERHADAP  
RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD  
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2017.**

**DEMAK, 6 JULI 2018**

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK  
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK  
(0291) 685577 FAX 681480 - PO.BOX 1000 DEMAK**



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK  
NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

Menimbang

- a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk 1 (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
- b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2018;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 5. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
- 6. Peraturan Bupati Demak Nomor 57 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018;
- 7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 28 Juni 2018.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan  
KESATU

: Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. Rapat Fraksi - Fraksi DPRD : Senin & Selasa  
Kabupaten Demak. 2 & 3 Juli 2018  
(Pukul 13.00)
  
2. a. Rapat Paripurna Pemandangan : Rabu  
Umum Bupati terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD. 4 Juli 2018  
(Pukul : 09.00)
- b. Rapat Paripurna Pemandangan  
Umum Fraksi - Fraksi terhadap 4  
(empat) Raperda Eksekutif.
- c. Rapat Paripurna Penyerahan  
Raperda Pertanggungjawaban  
Pelaksanaan APBD Kabupaten  
Demak Tahun Anggaran 2017.
- d. Halal Bi Halal.
  
3. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD  
bersama Ketua - Ketua Fraksi, Ketua  
Badan Pembentukan Raperda dan  
Ketua Badan Kehormatan DPRD  
Kabupaten Demak membahas  
a. Pemandangan Umum Bupati  
terhadap  
- Raperda tentang Penyelenggaraan  
Usaha Hiburan di Kabupaten  
Demak.  
- Raperda tentang Penataan,  
Pembinaan dan Pengawasan Pasar  
Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan  
Pasar Modern.
- b. Membahas Pembentukan Panitia  
Khusus 2 (dua) Raperda Inisiatif,  
Perubahan Peraturan DPRD Nomor  
1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib  
DPRD Kabupaten Demak dan  
5 (lima) Raperda Eksekutif :  
- Raperda tentang Pembentukan  
Badan Usaha Milik Daerah  
Kabupaten Demak.  
- Raperda tentang Perubahan Bentuk  
Hukum Badan Usaha Milik Daerah  
Kabupaten Demak  
- Raperda tentang Perubahan atas  
Perda Kabupaten Demak Nomor 10  
Tahun 2012 tentang Penyertaan  
Modal Pemerintah Kabupaten  
Demak pada Badan Usaha Milik  
Daerah.

Kamis  
5 Juli 2018  
(Pukul : 09.00)

- Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- LPP APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017.

4. a. Rapat Paripurna Jawaban DPRD Kabupaten Demak atas Pemandangan Umum Bupati terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif DPRD. : Jumat  
6 Juli 2018  
(Pukul : 13.00)
- b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap 4 (empat) Raperda.
- c. Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi - fraksi terhadap LPP APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017.
- d. Pembentukan Panitia Khusus.
5. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi - fraksi terhadap LPP APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017. : Senin 9 Juli  
2018  
(Pukul 13.00)
6. Kegiatan dan Rapat Panitia Khusus : Selasa s/d  
Rabu  
10 s/d 25 Juli  
2018
7. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - Ketua Fraksi, Ketua Badan Pembentukan Raperda dan Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak serta Pimpinan Panitia Khusus A, B dan C membahas 2 (dua) Raperda Inisiatif, 5 (lima) Raperda Eksekutif dan Perubahan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak. : Kamis, 26 Juli  
2018  
(Pukul 13.00)
8. Rapat Paripurna Persetujuan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017. : Jumat, 27 Juli  
2018  
(Pukul 13.00)
9. Evaluasi Gubernur atas Raperda LPP APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017. : Senin, 30 Juli  
2018
- 10 a. Rapat Paripurna Penetapan 2 (dua) Raperda Inisiatif : Selasa, 31 Juli  
2018  
(Pukul 13.00)
  - Raperda tentang Penyelenggaraan Usaha Hiburan di Kabupaten Demak.

- Raperda tentang Penataan, Pembinaan dan Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Pasar Modern.

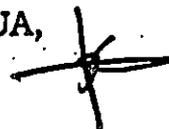
b. Rapat Paripurna Penetapan 4 (empat) Raperda Eksekutif

- Raperda tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak.
- Raperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Demak.
- Raperda tentang Perubahan atas Perda Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Demak pada Badan Usaha Milik Daerah.
- Raperda tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

c. Rapat Paripurna tentang Perubahan Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2017 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Demak.

- KEDUA** : Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang ke 2 (dua) 30 Juni & 1 Juli 2018.
- KETIGA** : Alat-Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari-hari di luar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini, dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
- KEEMPAT** : Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dilakukan melalui Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.
- KELIMA** : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
Pada tanggal 28 Juni 2018  
DPRD KABUPATEN DEMAK  
KETUA,



NURUL MUTTAQIN

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohim, Rapat Paripurna ke 21 DPRD Masa Sidang 2 Tahun Sidang 2018 dengan acara Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap **Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak TA 2017**, pada hari ini Jum'at 6 Juli 2018, kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

..... (Dok, dok, dok) .....

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia ;

Setelah diserahkan **Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak TA 2017** pada tanggal 4 Juli 2018 yang lalu, sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan dalam Keputusan Badan Musyawarah DPRD Nomor 11 tahun 2018 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Demak tahun 2018 pada hari ini Jum'at 6 Juli 2018 merupakan agenda Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi

**RAPAT PARIPURNA KE 21 DPRD DENGAN  
ACARA PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI  
TERHADAP RAPERDA PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2017**

Demak, 6 JULI 2018

**PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT**

Assalamu'alaikum Warochmatullahi Wabarokatuh

Ykh. para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Memasuki agenda kegiatan rapat berikutnya pada hari ini, kami sampaikan sebagaimana daftar hadir dalam rapat Paripurna sebelumnya, bahwa Anggota DPRD yang telah menandatangani daftar hadir sebanyak ..... dari sejumlah 50 Anggota DPRD. Dengan demikian rapat telah memenuhi kuorum.

Kesempatan **Kedua** kami berikan kepada Juru Bicara Fraksi Golkar untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

### PEMANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR

*Membacakan Pemandangan Umum Fraksi Golkar (terlampir)*

### PIMPINAN RAPAT

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara Fraksi Golkar yang telah membacakan pemandangan umum fraksinya.

Kesempatan **ketiga** kami berikan kepada Juru Bicara Fraksi Gerindra dipersilakan.

### PEMANDANGAN UMUM FRAKSI Gerindra

*Membacakan Pemandangan Umum Fraksi Gerindra (terlampir)*

### PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara Fraksi Gerindra yang telah membacakan pemandangan umum fraksinya.

DPRD Kabupaten Demak terhadap Raperda tersebut di atas.

Untuk mengetahui sejauh mana pandangan dan hasil pembahasan fraksi-fraksi, marilah kita dengarkan bersama beberapa hal yang perlu mendapatkan jawaban dan penjelasan dari Bupati berkaitan dengan hasil kerja fraksi-fraksi terhadap **Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak TA 2017** yang akan disampaikan oleh Fraksi-fraksi.

Kesempatan **pertama** kami berikan kepada Juru Bicara Fraksi PKB untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

### PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PKB

*Membacakan Pemandangan Umum Fraksi PKB (terlampir)*

### PIMPINAN RAPAT

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara Fraksi PKB yang telah membacakan pandangan umum fraksinya.

Kesempatan **keenam** kami berikan kepada Juru Bicara Fraksi PKS untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

### PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PKS

*Membacakan Pemandangan Umum Fraksi PKS (terlampir)*

### PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara Fraksi PKS yang telah membacakan pemandangan umum fraksinya.

Untuk Pemandangan umum yang terakhir atau **ketujuh** kami berikan kepada Juru Bicara Fraksi Amanat Demokrasi untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

### PEMANDANGAN UMUM FRAKSI AMANAT DEMOKRASI

*Membacakan Pemandangan Umum Fraksi Amanat Demokrasi (terlampir)*

Kesempatan **keempat** kami berikan kepada Juru Bicara Fraksi PDIP dipersilakan.

### PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PDIP

*Membacakan Pemandangan Umum Fraksi PDIP (terlampir)*

### PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara Fraksi PDIP yang telah membacakan pemandangan umum fraksinya.

Kesempatan **kelima** kami berikan kepada Juru Bicara Fraksi PPP untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

### PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PPP

*Membacakan Pemandangan Umum Fraksi PPP (terlampir)*

### PIMPINAN RAPAT:

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara Fraksi PPP yang telah membacakan pemandangan umum fraksinya.

diselenggarakan pada hari Senin tanggal  
**9 Juli 2018.**

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia

Sebelum Rapat paripurna ini ditutup akan diumumkan Pembentukan Panitia Khusus yang membahas 2(dua) Raperda inisiatif DPRD dan 5 (lima) Raperda Kabupaten Demak, dan 1 (satu) Peraturan DPRD, yang akan dibacakan oleh Sekretariat, dipersilahkan ...

#### SEKRETARIAT DPRD

***Membacakan Pembentukan Pansus yang membahas 2(dua) Raperda inisiatif DPRD dan 5 (lima) Raperda Kabupaten Demak, dan 1 (satu) Peraturan DPRD***

#### PIMPINAN RAPAT

Terima kasih kepada Sekretariat yang telah membacakan Pembentukan Panitia Khusus

#### PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara Fraksi Amanat Demokrasi yang telah membacakan pemandangan umum fraksinya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia.

Demikianlah tadi ketujuh Fraksi DPRD Kabupaten Demak telah menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya, yang berupa pendapat, saran, masukan serta pertanyaan yang perlu mendapatkan jawaban dan penjelasan dari Bupati dan semoga menjadi sumbang saran pemikiran yang bermanfaat guna bahan kajian oleh Bupati terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan Raperda Kabupaten Demak. Untuk itu DPRD mengharapkan kepada Yth. Sdr. Bupati Demak untuk dapat memberikan jawaban dan tanggapan terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi, dalam rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Raperda, Kabupaten Demak yang Insya Allah akan

Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridlo wal  
inayah.

Wassalamu'alaikum Warohmatulloh  
Wabarokatuh.

Demak, 6 Juli 2018

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia  
Demikianlah tadi rangkaian acara Rapat  
Paripurna DPRD dalam rangka Pemandangan  
Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap **Raperda  
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan  
APBD Kabupaten Demak TA 2017** dapat  
berjalan dengan tertib dan lancar.

Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih  
kepada semua pihak yang telah membantu  
kelancaran jalannya Rapat Paripurna DPRD hari  
ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu  
memberikan ridlo-Nya kepada kita semua, amin,  
amin ya robbal alamin.

Akhirnya dengan mengucapkan  
Alhamdulillahirobbil 'aalamin Rapat Paripurna ke  
21 DPRD Kabupaten Demak Masa Sidang 2 Tahun  
Sidang 2018 kami nyatakan ditutup.

----- dok, dok, dok -----



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No. 45 Telp. (0291) 685577 – 685.877 Fax. 681480 – PO BOX 1000 Demak

## DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA TAHUN SIDANG 2018

HARI, TANGGAL : JUM'AT, 6 JULI 2018  
 JAM : 13.00 WIB  
 TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK  
 ACARA : PEMANDANGAN UMUM FRAKSI – FRAKSI TERHADAP RAPERDA  
 PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN  
 DEMAK TAHUN ANGGARAN 2017.

NO.	N A M A	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4
1.	H. NURUL MUTTAQIN, SH.MH	1.....	
2.	NURYONO PRASETYO, SE	2.....	
3.	H. MUNTOHAR	3.....	
4.	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE	4.....	
5.	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I	5.....	
6.	KASTAMAH	6.....	
7.	ULIN NUHA, S.PdI	7.....	
8.	PARSIDI, ST.MT	8.....	
9.	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, MPd.I	9.....	
10.	NUR FADLAN, S.Ag	10.....	
11.	Drs. H. SYAFI' I AFANDI, S.Pd	11.....	
12.	H. GHOZALI, S.PdI	12.....	
13.	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	13.....	
14.	ROBERT FRENDY KURNIAWAN	14.....	
15.	YUDO ASTIKO, S.Pd, MM	15.....	
16.	SUNARI, SE	16.....	
17.	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom	17.....	
18.	NUR WAHID, SHI	18.....	
19.	H. SANIPAN	19.....	
20.	H. BUDHI ACHMADI, SE	20.....	
21.	H. ALI SUBHAN, S.Ag	21.....	
22.	H. MU'THI KHOLIL, SH	22.....	
23.	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag	23.....	
24.	MARWAN	24.....	
25.	AHMAD MANSUR, SE	25.....	

1	2	3	4
26.	H. DANANG SAPUTRO, SH	26.....	
27.	TATIEK SOELISTIJANI, SH	27.....	
28.	H. FAOZAN, SH.	28.....	
29.	H. SUGIHARNO, SP	29.....	
30.	H. KHOERON, M.Pd.I	30.....	
31.	H. SONHAJI, SH	31.....	
32.	H. SUDARNO, S.Sos	32.....	
33.	H. ARIFIN, S.Pd.I	33.....	
34.	H. ABU SAID, S.Pd.I	34.....	
35.	LATIFAH	35.....	
36.	H. SABIQ HAMBALI	36.....	
37.	H. ROZIKHAN ANWAR, SH	37.....	
38.	H. AHMAD MUDHOFAR, SE	38.....	
39.	SUHADI	39.....	
40.	SAFUWAN, SP	40.....	
41.	KAMZAWI, S.Ag	41.....	
42.	GUNAWAN	42.....	
43.	MUHAMMAD YASIN	43.....	
44.	IBRAHIM SUYUTI, SH	44.....	
45.	H. NGASPAN, A.Md	45.....	
46.	FATKHAN, SH	46.....	
47.	Dra. SUSI ALIFAH	47.....	
48.	H. FARODLI, S.Pd.I	48.....	
49.	AGUS HARYONO, S.Sos	49.....	
50.	APRILLIA RAHMAWATI, S.Pd	50.....	

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
PIMPINAN RAPAT**





# KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480

Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Hari : Jum'at  
 Tanggal : 6 Juli 2018  
 Jam : 13.00 WIB  
 Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak  
 Acara : Rapat Paripurna Jawaban DPRD Kabupaten Demak atas Pemandangan Umum Bupati Demak terhadap 2 (dua) Raperda Inisiatif, Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas pandangan Umum Fraksi terhadap 4 (empat) Raperda dan Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi – fraksi terhadap LPP APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017.

NO.	NAMA KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1.	SEKRETARIS DAERAH KAB. DEMAK			1.	
2.	SEKRETARIS DPRD DEMAK			2.	
3.	INSPEKTORAT	Hermin	Insanwil. 3	3.	
4.	ASISTEN I	Wahyuni	AS 1	4.	
5.	ASSISTEN II	N. N. N.	AS 2	5.	
6.	ASSISTEN III	Agus S.	AS 3	6.	
7.	STAF AHLI HUKUM DAN PEMERINTAHAN	MUGIANA	SA	7.	
8.	STAF AHLI BID. PEMBANGUNAN, PERKONOMIAN	Dwi Heru A.	SA	8.	
9.	STAF AHLI BIDANG, SDM DAN KESRA	M. D. D.	SA	9.	
10.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	Ariyo Gendy	Ka.	10.	
11.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	S. W. W.	KABUD	11.	
12.	DINAS PARIWISATA	Kusuma S.	Kabud	12.	
13.	DINAS KESEHATAN	S. W. W.	Ka.	13.	
14.	DINAS SOS P2PA	M. H. H.	SA	14.	
15.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCACATAN SIPIL	Pudji Hartono	Kor. Cepio	15.	
16.	DINAS PERMADES, P2KB	CANDRA	Ka. SH	16.	
17.	SATPOL PP	RIZKI RAN	Kg. Perawatan	17.	
18.	DINAS PM DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	A. H. H.	Suleag	18.	
19.	DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI, UKM.	Coey	Velord	19.	

20.	DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN	Kusdarmawan	Kabid		20.	
21.	DINAS PU TARU	Doso P	KR	21.		
22.	DINAS PERKIM	Achmad S	Belu		22.	
23.	DINAS PERHUBUNGAN	Praob	kelece	23.		
24.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	M. Asruch	Sekr. asist		24.	
25.	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN	Heri W	Kabid TPK	25.		
26.	DINAS LUTKAN	Sugimin	Kabid Pstff		26.	
27.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	Anggi B.	Kabid Kearsipan	27.		
28.	DINAS KOM INFO	Daryanto	Ka		28.	
29.	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Edy P.	Banuhary	29.		
30.	BAG. HUMAS	Lilik S.	Kasubag		30.	
31.	BAG. HUKUM	Pieman	Ka	31.		
32.	BAG. PEREKONOMIAN	Fadheli			32.	
33.	BAG. ADMINISTRASI PEMBANGUNAN			33.		
34.	BAG. KESRA	Isuoyo	KESRA		34.	
35.	BAG. ORPEG	TRI EDY UTOMO	ORPEM	35.		
36.	BAG. KEUANGAN	Agus H.	Ka		36.	
37.	BAG. UMUM	YOGI	Kasubag.	37.		
38.	BKPP KAB. DEMAK	Soetanto	BKPP		38.	
39.	BPKP DAN AD KAB. DEMAK	Suhakbakti	Ka.	39.		
40.	BAPPEDA LITBANG	HERU P.	Belu		40.	
41.	BPN KAB. DEMAK			41.		
42.	BPS KAB. DEMAK				42.	
43.	BPBD KAB. DEMAK	SW. Utami		43.		
44.	KAN. KESBANGPOL	Dhoro B.	Belu		44.	
45.	KAN. KEMENAG KAB. DEMAK	Sugimin	Kan	45.		
46.	KAN. PAJAK PRATAMA DMK				46.	
47.	KAN. PENGADILAN AGAMA			47.		
48.	RSUD SUNAN KALIJAGA.	Mustahid	Asst. Rm		48.	
49.	KPUD DEMAK			49.		
50.	SEKRETARIS KPUD DEMAK				50.	
51.	BPD JATENG CAB. DEMAK			51.		

52.	P D A M				52.
53.	R U T A N			53.	
54.	P L N				54.
55.	U P P D			55.	
56.	KECAMATAN DEMAK	M. Fakhri	@		56. <i>KA</i>
57.	KECAMATAN BONANG	Rach G.	Kubi	57.	<i>[Signature]</i>
58.	KECAMATAN WEDUNG	Suyul	Jekam		58. <i>[Signature]</i>
59.	KECAMATAN KARANGANYAR	Ag. Arsan	Thant	59.	<i>[Signature]</i>
60.	KECAMATAN GAJAH	Hari Setyo	Kesia Tapan		60. <i>[Signature]</i>
61.	KECAMATAN MIJEN	Rurkanto	Jekam Mipen	61.	<i>[Signature]</i>
62.	KECAMATAN KEBONAGUNG	Tommy	Kyo		62. <i>[Signature]</i>
63.	KECAMATAN MRANGGEN	Mahat	Boy	63.	<i>[Signature]</i>
64.	KECAMATAN KARANGAWEN	M. Eyo	Carl		64. <i>[Signature]</i>
65.	KECAMATAN SAYUNG	Akrit in	Kesi Besa	65.	<i>[Signature]</i>
66.	KECAMATAN KARANGTENGAH	Beldi	Carl		66. <i>[Signature]</i>
67.	KECAMATAN GUNTUR	U. Carci	Secam	67.	<i>[Signature]</i>
68.	KECAMATAN WONOSALAM	Yam	Sisy Pogn		68. <i>[Signature]</i>
69.	KECAMATAN DEMPET	Johes	Caru	69.	<i>[Signature]</i>

DEWAN PERWAKILAN RAKYA DAERAH  
KABUPATEN DEMAK  
PIMPINAN RAPAT.



H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE

**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA (FKB)  
DPRD KABUPATEN DEMAK**



**TERHADAP  
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN DAN  
PELAKSANAAN APBD DAERAH KABUPATEN  
DEMAK TAHUN ANGGARAN 2017  
PADA SIDANG PARIPURNA DPRD KAB. DEMAK  
TAHUN 2018  
Demak, 06 Juli 2018**



**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA  
DPRD KABUPATEN DEMAK  
TERHADAP  
LAPORAN PERTANGGUNG JAWABAN  
DAN PELAKSANAAN APBD DAERAH  
KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2017  
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2018**

---

Assalamualaikum wr. wb.

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيدنا محمد أما بعد:-

**Kepada ;**

**Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak**

**Yth. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Demak.**

**Yth. Saudara Unsur Muspida Kabupaten Demak**

**Yth. Saudara Ketua Pengadilan Negeri Kab. Demak**

**Yth. Saudara Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Demak**

**Yth. Ketua Kejaksaan Negeri Kabupaten Demak.**

**Yth. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.**

**Yth. Saudara staf Ahli Bupati dan asisten sekda Kab. Demak.**

**Yth. Saudara SKPD di lingkungan Pemerintahan Kab.  
Demak**

**Yth. Saudara FORKOPIMCAM se-Kabupaten Demak,  
dan**

**Yth. Para undangan dan teman insan pers yang  
berbahagia**

**Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang berbahagia**

Mengawali Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi  
Kebangkitan Bangsa, marilah terlebih dahulu bersama-sama  
kita Panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas segala  
nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga pada  
hari ini masih dapat mengikuti sidang paripurna DPRD  
Kabupaten Demak

Selanjutnya sholawat serta salam semoga senantiasa  
tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita  
nanti-nantikan Syafaatnya.

Terimakasih kami sampaikan kepada Pimpinan sidang,  
yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk  
menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Kebangkitan  
Bangsa, pada Sidang paripurna siang hari ini.

Selanjutnya Setelah kami baca nota Pengantar Bupati dalam rangka Penyerahan Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017.

kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) dan dari hasil mencermati fakta di lapangan sehingga fraksi kebangkitan bangsa melalau hasil rapat akhirnya di tuangkan di dalam Pemandangan umum sebagaimana akan kami sampaikan pada siang hari ini.

Fraksi Kebangkitan Bangsa ( FKB ) DPRD Kabupaten Demak menyampaikan beberapa hal pendapat, saran, masukan serta pertanyaan dalam Sidang Paripurna DPRD Demak sebagai berikut :

Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017 yang terdiri atas;

### **1. Pendapatan**

- a. Pendapatan asli Daerah      Rp.      309.612.407.201,00  
*terbilang ( tiga ratus sembilan milyar Enam ratus dua belas juta Empat ratus Tujuh ribu duaratus satu rupiah)*

- b. Dana Perimbangan Rp. 1.230.548.143.827,00  
Terbilang ( *Satu Triliyun Dua Ratus Tiga puluh Milyar Lima ratus Empat puluh Delapan juta Seratus empat puluh tiga ribu Delapan ratus dua puluh tujuh Rupiah* )
- c. Lain-lain PAD yang sah Rp. 520.703.732.395,00  
Terbilang ( *Lima ratus dua puluh milyar Tujuh ratus tiga juta Tujuh ratus dua puluh sembilan juta Tiga ratus sembilan lima rupiah* )

**J u m l a h** Rp. 2.060.864.280.423,00  
Terbilang ( *Dua Triliyun Enam puluh milyar Delapan ratus Enam puluh empat juta Dua ratus Delapan puluh ribu Empat ratus dua puluh tiga rupiah* )

## **2. Belanja**

- a. Belanja Tidak langsung Rp. 1.075.852.437.848,00  
Terbilang ( *Satu triliyun Tujuh puluh lima milyar Delapan ratus Lima puluh Dua milyar Empat ratus tiga puluh tujuh ribu Delapan ratus empat puluh delapan rupiah* )

b. Belanja Tidak Langsung Rp. 1.986.479.116.398,00  
*Terbilang ( Satu triliyun Sembilan ratus delapan puluh enam milyar Empat ratus tujuh puluh Sembilan juta Seratus enam belas ribu Tiga ratus sembilan puluh delapan rupiah*

Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 27 (2) Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah Bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah , dan memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan kepada Masyarakat, serta Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang selanjutnya melalui amandemen menjadi Undang-undang No.09 tahun 2015, serta mengacu Undang-undang No. 17 tentang Keuangan Negara.

Dengan ini ada beberapa cacatan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa terhadap Laporan Pertanggung jawaban Saudara Bupati Demak;

1. Terkait dengan pendapatan sektor PAD ( Pendapatan Asli Daerah ) Kab. Demak sangat minim bila di banding

dengan Daerah-daerah lain, maka perlunya Pemerintah Kab. Demak untuk meningkat sektor tersebut dengan membuka usaha-usaha Daerah baik dengan membentuk BUMD.

Dalam rangka mendorong Pembangunan Daerah, salah satunya Pendirian BUMD ( Badan Usaha Milik Daerah ) tentu peranannya sangat di nanti oleh Publik Demak, alasannya adalah ;

- Pendapatan sumbangan bagi retribusi Daerah,
- Pendapatan Daerah dari Pajak,
- Pendapatan dari dividen, dan
- Privatisasi.

Yang kesemuanya merupakan penyumbang bagi pendapatan Daerah Kabupaten Demak.

dan PAD yang lain yang Syah tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

2. Mengenai pekerjaan umum pembangunan infra struktur Jalan dan Jembatan sampai tahun 2017 terus mengalami kemajuan dan hampir mayoritas baik namun yang perlu di tingkatkan penanganan irigasi dan sungai- sungai harus betul-betul di perhatikan terutama di zona rawan banjir seperti Kecamatan sayung dengan berkoordinasi

## **Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang berbahagia**

Demikian Pemandangan umum dari Fraksi Kebangkitan Bangsa terhadap Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahan Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017.

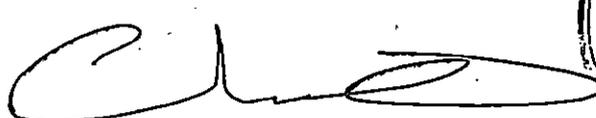
telah kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dengan harapan masukan dari kami betul-betul di perhatikan dan dilaksanakan oleh Bupati sampai pada jajaranya demi cita-cita bersama.

Akhirnya, semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan kekuatan untuk mengemban amanahNya. Amien...

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Demak, 06 Juli 2018

### **FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA DPRD KABUPATEN DEMAK**



**H. GHOZALY, S.Pd.I.**

Ketua

**NUR FADLAN, S.Ag**

Sekretaris



**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA  
DPRD KABUPATEN DEMAK  
TERHADAP  
RAPERDA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN APBD 2017  
KABUPATEN DEMAK**

**SIDANG PARIPURNA DPRD DEMAK**

**DEMAK, 6 JULI 2018**

**PANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**  
**DPRD KABUPATEN DEMAK**  
**TERHADAP**  
**RAPERDA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN**  
**APBD 2017**  
**KABUPATEN DEMAK**

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Yth. Sdr. Bupati dan wakil Bupati,

Yth. Sdr. Ketua , Wakil Ketua, dan Seluruh Anggota Dewan,

Yth. FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak,

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan,

Yth. Sdr. Para Asisten dan Staf Ahli Bupati,

Yth. Sdr. Kepala OPD , Badan, Instansi, Bagian, Sdr. Camat Se-Kabupaten Demak,  
dan hadirin yang berbahagia.

Dengan memohon ridho Allah SWT, senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat-Nya atas segala limpahan rahmat dan hidayah bagi kita sekalian. Tak lupa, Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Junjungan Nabi Agung Muhamad SAW yang senantiasa memberikan tuntunan bagi kita menuju jalan kebenaran. Amin.

**Hadirin Sidang Paripurna yang berbahagia.**

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017 merupakan penjelasan tentang pertanggungjawaban keuangan sebagai pelaksanaan anggaran tahun yang telah berjalan. Laporan Keuangan haruslah disajikan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta sesuai dengan Peraturan Pemerintah no 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Sebagaimana telah disampaikan dalam Pengantar Nota Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 dalam Sidang Paripurna beberapa hari yang lalu, bahwa Laporan Keuangan telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan dinyatakan secara resmi dengan Predikat Opini

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Terhadap hal ini, Fraksi Partai Golongan Karya menyampaikan selamat atas hasil yang telah diperoleh kepada seluruh jajaran tanpa terkecuali. Dengan opini WTP, menunjukkan telah terpenuhinya pengelolaan keuangan daerah dengan baik yang secara administrasi telah sesuai **Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**. Hal ini pula menunjukkan telah adanya peningkatan kinerja di setiap instansi pemerintah. Predikat WTP ini harus terus dipertahankan dan bahkan akan semakin memecut etos kerja.

### **Sidang Paripurna yang berbahagia,**

Opini WTP merupakan satu target yang harus dicapai dalam pengelolaan pemerintahan. Opini WTP bukanlah berarti pelaksanaan APBD 2017 telah dilaksanakan secara maksimal dan tanpa adanya kendala-kendala, masih banyak hal yang perlu mendapat perhatian agar program dan anggaran yang telah ditetapkan dapat terlaksana dalam upaya mencapai kemakmuran rakyat. Fraksi Partai Golkar sebagai bagian penyelenggara pemerintahan senantiasa berkomitmen untuk memberikan sumbang saran, kritik yang konstruktif serta melakukan kontroling sebagaimana fungsi legislative.

Terhadap LPP APBD 2017 tersebut, Fraksi Partai Golkar perlu menyampaikan beberapa catatan dan masukan guna penyempurnaan Raperda Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017, sbb:

1. Membrikan apresiasi yang setinggi tingginya atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017. Suatu prestasi yang patut dibanggakan dalam pengelolaan pemerintahan. Opini WTP ini hendaklah menjadi pendorong motivasi kerja dalam upaya terwujudnya visi dan misi Kabupaten Demak.
2. Pencapaian realisasi anggaran APBD 2017 sebesar Rp 2.060.864.280.423,00 ( **Dua triliyun enam puluh milyar delapan ratus enam puluh empat juta dua ratus delapan puluh ribu empat ratus dua puluh tiga rupiah** ) dari yang ditargetkan sebesar Rp 2.052.162.981.000,00 ( **Dua triliyun lima puluh dua milyar seratus enam puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah** ) merupakan prestasi kinerja Pemerintah Kabupaten Demak yang Fraksi Partai Golkar harus apresiasi.

3. Terkait SILPA tahun anggaran 2017 sebesar Rp 124.548/512.850,00, ( **Seratus Dua Puluh Empat Milyar Lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu delapan ratus lima puluh rupiah** ) Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa SILPA tersebut terlalu besar. Jika dicermati dari sisi perencanaan berarti terdapat program kegiatan yang tingkat serapannya rendah ataupun adanya program kegiatan yang tidak terlaksana. Seperti kita ketahui bersama, di tahun 2017 kita telah melakukan perubahan susunan perangkat daerah berdasarkan Perda No 5 tahun 2016 sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah No 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, hal ini dimaksudkan agar penyelenggaraan urusan pemerintahan berjalannya efektif efisien. ....
4. Terdapat ketidaktaatan dalam pencatatan keuangan samapi dengan 31 Desember 2017 : Adanya Sisa uang Persediaan Bendahara Pengeluaran Kelurahan Mangunjiwan sebesar Rp 7.798.936,00 ( **Tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah** ) dan pajak yang sudah dipungut tetapi belum disetor ke Rekening Kas Negarapada Kec. Karangawen sebesar Rp 24.873.887,00 ( **Dua puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah** ) di BPKPAD sebesar Rp 787.500,00, ( **Tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah** ) belanja yang telah terbit SP2D nya tetapi masih di rekening bendahara Pengeluaran yaitu kekurangan gaji pada Puskesmas Mranggen 2 sebesar Rp 1.325.500,00 ( **Satu juta tiga ratus dua puluh lima ribu lima ratus rupiah** ) belum diserahkan ke Pegawai yang bersangkutan. Kekurangan gaji Kecamatan Bonang sebesar Rp 178.900,00 ( **Seratus tujuh puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah** ) belum diserahkan kepada pegawai yang bersangkutan dan Jaminan Kecelakaan Kerja dan Kematian Kecamatan Dempet masih di Rekening bendahara pengeluaran. Saldo kas di Rekening bendahara Pengeluaran Pembantu SMP 2 Mranggen sebesar Rp 490.000,00. ( **Empat ratus sembilan puluh ribu rupiah** ). Yang tercatat sebagai uang pribadi bendahara pengeluaran sebagai honor/uang sinding bendahara pengeluaran. Terdapat pula saldo di rekening bendahara pengeluaran TK Negeri Demak sebesar Rp 27,00 ( **Dua puluh tujuh rupiah** ) karena terdapat kesalahan saat pengambilan kas. Terhadap hal-hal tersebut di atas mohon dapat dijelaskan !

5. Terdapat piutang pajak tahun 2017 dari sebesar Rp 16.091.935.863,00 ( **Enam belas milyar sembilan puluh satu juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu delapan ratus enam puluh tiaga rupiah** ) yang merupakan piutang PBB-P2 pelimpahan dari KPP Pratama dan piutang murni dari tahun 2013 sampai dengan 2017 sebesar Rp 19.914.056.098,00 ( **Sembilan belas milyar sembilan ratus empat belas juta lima puluh enam ribu sembilan puluh delapan rupiah** ). **Mohon penjelasan kondisi sampai dengan saat ini!**
6. Pada saat penyusunan Laporan ini, retribusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Morodemak sedang dalam tahap pemeriksaan Aparat Penegak Hukum. **Mohon Penjelasan Pendapatan daerah Tempat Pelelangan Ikan yang ada!**
7. Terdapat Penurunan Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan sebesar Rp 1.276.144.296,00 ( **Satu milyar dua ratus tujuh puluh enam juta seratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh enam rupiah** ) dari tahun 2016 sebesar Rp 2.956.201.218,00 ( **Dua milyar sembilan ratus lima puluh enam juta dua ratus satu ribu dua ratus delapan belas rupiah** ) menjadi 1.680.056.922,00, ( **Satu milyar enam ratus delapan puluh juta lima puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh dua rupiah** ) padahal geliat pembangunan di Kabupaten Demak meningkat dari tahun ke tahun. **Mohon Penjelasan!**
8. Bagaimana evaluasi untuk program program yang diterima petani dari dana tugas perbantuan di Dinas Pertanian? **Mohon Penjelasan!**
9. **Mohon penjelasan dan dasar terhadap pembangunan taman kota yang pelaksanaannya mengubah tema menjadi taman "Matikan TV Ayo Mengaji"** . Padahal ini adalah tugu batas kota.

**Hadirin yang berbahagia,**

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap RAPERDA Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017. Kiranya pandangan umum kami dapat memberi masukan dan pertimbangan dalam pembahasan Raperda LPP APBD 2017 pada tingkat selanjutnya. Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu/ Sidang

Pariapura. Permohonan maaf sudah barang tentu kami sampaikan "kilat menyambar pohon kelapa, tumbang menimpa rumah tetangga, mohon maaf yang kami minta, damai di hati kan tetap terjaga.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

**Demak, 8 Juli 2018**

**Fraksi Partai Golongan Karya**

**DPRD Kab. Demak**

  
**Yudo Astiko, S.Pd.MM**  
/Ketua



  
Hermin  
Sekretaris



**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)  
DPRD KABUPATEN DEMAK  
TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**Disampaikan dalam Rapat Paripurna  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Demak  
Jum'at, 6 Juli 2018**

**PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)  
DPRD KABUPATEN DEMAK  
TERHADAP LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2017**

**Disampaikan dalam Rapat Paripurna  
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( DPRD ) Kabupaten Demak,  
Jum'at, 6 Juli 2018**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*  
**Salam Indonesia Raya !**

Yang terhormat, saudara Bupati dan Saudara Wakil Bupati Demak

Yang kami hormati, saudara pimpinan beserta anggota DPRD  
Kabupaten Demak

Yang kami hormati Forkompinda dan Ketua Pengadilan Negeri  
Kabupaten Demak

Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD  
Kabupaten Demak

Yang kami hormati para Staf Ahli dan Asiseten Sekretaris Daerah

Yang kami hormati Kepala /Dinas/Badan/Kantor/ Instansi/Bagian  
dan Camat se- Kabupaten Demak

Yang kami hormati para wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita semua selalu bersyukur kepada Allah SWT , karena  
hanya rahmat , taufiq dan kasih sayang-Nya yang diberikan kepada

kita semua , pada hari ini Jum'at, 6 Juli 2018 kita bisa bersana-sama ditempat ini dapat menjalankan amanat rakyat mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan agenda pemandangan umum fraksi - fraksi terhadap Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 yang telah disampaikan saudara bupati beberapa waktu lalu.

Selanjutnya sholawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW , marilah senantiasa kita kumandangkan tiada henti disepanjang waktu . Karena beliaulah satu-satunya hamba Allah SWT yang dapat memberikan syafaat, pembelaan dan pertolongan kepada kita semua pada saat-saat yang paling sulit kelak di hari pembalasan, saat mulut kita terkunci yang bersamaan dengan itu semua organ tubuh kita bersaksi atas semua hal yang kita lakukan selama hidup di dunia ini.

Saudara bupati, pimpinan ,anggota dewan dan hadirin yang berbahagia.

Melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak pada hari ini perkenankan Fraksi Gerindra mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dewan yang telah memberikan alokasi waktu kepada fraksi kami untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap LPP APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 20167.

Namun sebelumnya melalui forum yang mulia ini perkenankan fraksi Gerindra mengucapkan selamat Idul Fitri 1438H , mohon maaf lahir dan batin kepada umat Islam yang baru saja menunaikan salah satu rukun Islam yakni puasa ramadhan, semoga kita semua menjadi orang-orang yang benar-benar muttaqin dan diberi kemampuan oleh

Allah SWT untuk saling memaafkan sehingga kita kembali menjadi manusia yang fitri.

Kepada seluruh warga masyarakat dan komunitas pendidikan di kabupaten Demak, fraksi kami mengucapkan selamat memasuki tahun ajaran / akademik baru 2018/2019, semoga di awal masa pendidikan dan pembelajaran di berbagai tingkatan ini dapat memulainya dengan semangat baru pula. Capaian yang diraih tahun 2017/2018 dapat ditingkatkan pada era 2018/2019 yang sebentar lagi akan kita masuki dan lalui bersama-sama. Amiiin.

Saudara bupati, pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang berbahagia.

Agenda penyampaian LPP APBD oleh bupati di depan rapat paripurna dewan merupakan amanat konstitusi yang sebelumnya harus melalui tahap pemeriksaan oleh lembaga tinggi negara, yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebagaimana saudara bupati sampaikan beberapa waktu lalu bahwa LPP APBD Kabupaten Demak tahun 2017 setelah dilakukan pemeriksaan oleh BPK mendapat predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Atas keberhasilan meraih predikat WTP itu fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Demak mengucapkan "Selamat" dengan teriring doa semoga prestasi ini bisa terus ditingkatkan lagi di masa-masa mendatang.

Dengan keberhasilan meraih predikat WTP itu, fraksi kami mengingatkan bahwa prestasi ini mengandung konsekuensi yang tidak ringan. Karena dimasa-masa mendatang tentu prestasi itu harus dapat kembali terulang. Hal ini menjadi tantangan yang tidak ringan. Beban

untuk mempertahankan prestasi yang sudah dicapai dengan bagus di masa-masa berikutnya tentu tidaklah ringan dan mudah, karena itu saudara bupati bersama jajarannya harus bekerja lebih serius dan keras lagi.

Dibalik sukses mencapai peringkat WTP perkenankan fraksi kami menyampaikan catatan kritis sebagai berikut :

1. Realisasi pendapatan asli daerah ( PAD ) memang melampaui target yang dicanangkan hingga mencapai 100,42% disatu sisi memang menggembirakan, namun menurut kami penentuan target PAD perlu dicermati dan didalami lagi, karena jang-jangan target yang dicanangkan sebelumnya terlalu rendah. Sehingga ke depan penentuan target harus diawali dengan perencanaan yang matang , mendalam dan kajian potensi pendapatan yang lebih serius lagi.

Fraksi Gerindra dalam setahun terakhir menemukan berbagai potensi di sejumlah wilayah kabupaten Demak yang kalau mendapat sentuhan motivasi, stimulus dan kepedulian dari pengambil kebijakan akan dapat memunculkan nilai lebih yang pada akhirnya dapat mendongkrak perolehan atau pendapatan daerah.

2. Semestinya agar anggota dewan selaku wakil rakyat dapat memperoleh informasi dan gambaran nyata tentang potensi pendapatan lokal yang menjadi penopang Pendapatan Asli Daerah (PAD), saudara bupati menyampaikan informasi tentang hal itu dalam LPP APBD 2017 ini. Karena dari situ temuan potensi anggota dewan tentang potensi lokal dapat dikomparasikan dan disinkronkan demi terwujudnya optimalisasi PAD di masa-masa

mendatang. Fraksi kami menemukan berbagai potensi yang kalau dikelola dengan baik akan menjadi potensi sumber PAD yang produktif, namun sayangnya masih belum terkelola dengan baik sehingga hasilnya belum optimal.

3. Pasar - pasar yang berada dibawah pengelolaan Pemkab Demak , termasuk pasar Bintoro yang menjadi pasar sentral seharusnya bisa menjadi lokomotif perekonomian rakyat . Untuk mewujudkan itu maka terciptanya kondisi pasar yang tertib, nyaman bagi para penjual dan pembeli , aman dan tertib menjadi syarat utama yang tidak bisa ditawar. Namun kondisi itu semakin jauh dari kenyataan , karena itu kami berharap agar saudara bupati mengambil langkah-langkah cepat untuk menyelesaikan problem itu.
4. Pelayanan terhadap masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dalam upaya mendapatkan dokumen diri dan keluarga seperti KTP dan Kartu Keluarga dinilai masih belum maksimal. Tidak sedikit warga masyarakat yang menghadapi kendala, kami berharap saudara bupati segera mengatasi keluhan ini.
5. Masih ditemukannya persoalan-persoalan yang berpangkal akibat masih terjadinya miskomunikasi dan miskoordinasi antar organisasi perangkat daerah ( OPD ) dalam mensupport tugas-tugas bupati sehingga sering terjadi saling lempar tanggung jawab antar OPD jika ditemukan persoalan di lapangan , kami sarankan agar saudara bupati secepatnya kembali menyusun ulang TUPOKSI masing-masing OPD. Karena tidak ada satupun urusan yang berada di wilayah kabuoaten Demak ini yang

bukan menjadi tanggungjawab Pemerinatah Kabupaten Demak. Sekurang-kurangnya tanggung jawab itu adalah tanggung jawab koordinatif.

Saudara bupati, pimpinan ,anggota dewan dan hadirin yang berbahagia.

Demikian pemandangan umum fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Demak terhadap LPP APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2017 , kami berharap pengkritisan ini semoga dapat memicu kinerja saudara bupati di masa mendatang. Sehingga upaya untuk memanfaatkan potensi Demak dengan lebih maksimal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Demak dapat lekas terwujud.

Selain itu , kami juga menyarakan agar catatan kritis, evaluasi , saran , rekomendasi dan koreksi dari BPK hendaknya diperhatikan dan ditindaklanjuti dengan baik.

Akhirnya kepada hadirin kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian pemandangan umum ini terdapat kesalahan dan kekurangan. Terima kasih.

*Wallahumuwafiq ilaa aqwamith thariq*  
*Wassalamualaikum Wr. Wb*  
Salam Indonesia Raya !

Demak, 6 Juli 2018  
Fraksi Gerindra  
DPRD Kabupaten Demak

Ketua



H. Mu'thi Kholil SH

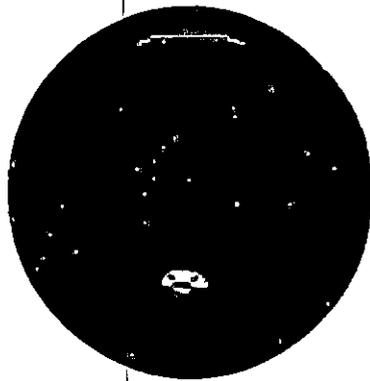


Sekretaris



Danang Saputro, SH

**PANDANGAN UMUM  
FRAKSI PDI PERJUANGAN  
DPRD KABUPATEN DEMAK**



**PDI PERJUANGAN**

**TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGANJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
DEMAK TAHUN ANGGARAN 2017**

**PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK  
DEMAK, 6 JULI 2018**

**PANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK**  
**TENTANG**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN**  
**ANGARAN 2017**

***Assalamu'alaikum Wr. Wb.***

Salam sejahtera bagi kita semua.

**Merdeka !!!**

Yang kami hormati. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Yang terhormat Sdr. Ketua, Para Wakil Ketua DPRD dan segenap Anggota  
DPRD Kabupaten Demak;

Yang kami hormati. Segenap Unsur FORKOMPIMDA dan Ketua Pengadilan  
Negeri Demak;

Yang kami hormati. Sdr. Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kab  
Demak;

Yang kami hormati. Sdr. Asisten Sekda, Kepala Bagian, Dinas, Kantor /  
Instansi di lingkungan pemerintah Kabupaten Demak;

Yang kami hormati. Sdr. Camat Se-Kabupaten Demak, Tamu Undangan,  
Teman-teman Wartawan, serta Pendengar Radio Suara  
Kota Wali yang kami cintai.

**Hadirin Peserta Rapat yang kami hormati;**

Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat dan hidayah-Nya, kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan agenda Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap **Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017.** yang telah disampaikan oleh saudara Bupati Demak pada tanggal 4 Juli 2018

1

Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW dengan mengucapkan *Allah humasholli'ala Muhammad wa'alaalisyaidina Muhammad*. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat-Nya .*Amien* yaa robal'amin.

Sebelum Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan Pandangan Umum terhadap **Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017** perkenankan kami mengucapkan:

1. Menyambut *back to school*, mari kita beri dukungan kepada orang tua yang putra putrinya masih duduk di bangku SD, SMP dan SMA / SMK, semoga diberikan kekuatan, kelancaran dalam membimbing dan membiayai putra putrinya untuk meraih cita-cita. Semoga kelak menjadi orang yang berguna bagi dirinya, keluarga, agama, masyarakat, nusa dan bangsa.
2. Kami ucapkan selamat kepada orang tua, yang putra putrinya telah diterima di sekolah tujuan dengan melalui proses PPDB 2018. Bagi yang belum berhasil semoga memperoleh sekolah alternatif yang benar-benar menjadi pilihan terbaik.
3. Selamat kepada Pasangan Ganjar Pranowo – Taj Yasin, yang unggul dalam hitungan cepat pada Pilgub Jateng 2018, semoga selanjutnya Jawa Tengah dapat semakin maju dari sebelumnya.

#### **Hadirin Peserta Rapat yang berbahagia;**

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD pada dasarnya merupakan perhitungan atas realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah selama satu tahun anggaran, di dalamnya memuat tentang Laporan Keuangan Daerah beserta kelengkapannya, yaitu LRA (Laporan Realisasi Anggaran), SaL/K (Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih/Kurang), LO (Laporan Operasional), Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan LAK (Laporan Arus Kas), CaLK (Catatan atas Laporan Keuangan), dari Laporan

Keuangan daerah tersebut, pada akhirnya dapat diketahui apakah pengelolaan anggaran daerah mengalami kemajuan atau kemunduran.

Dalam hal ini Bupati Demak secara resmi telah menyerahkan kepada DPRD Kabupaten Demak draft Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPP) APBD tahun 2017 sebagai LPP APBD tahun kedua RPJMD 2016 - 2021 dengan diterapkannya sistem *akrual basis*, selanjutnya menjadi tugas DPRD untuk membahas dan menilai kinerja keuangan daerah tersebut, sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban APBD.

DPRD Kabupaten Demak sebagai salah satu pilar Pemerintahan di daerah, sekaligus merupakan **representasi rakyat**, para anggotanya adalah mereka yang diamanatkan sebagai penyeimbang Pemerintahan Demak. Melalui **tiga fungsi yang melekat dengannya (*Pembentukan Perda, Anggaran dan Pengawasan*)** menjadikan anggota DPRD Demak sebagai pihak yang paling diandalkan oleh masyarakat untuk mengawal roda pemerintahan, oleh karena itu momen pembahasan pertanggungjawaban APBD oleh DPRD, menjadi titik kritis dari sebuah evaluasi pengelolaan kinerja keuangan daerah, dibutuhkan daya kritis dan nalar yang baik untuk mampu menjadi evaluator APBD, maka Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak dalam membahas dan menilai kinerja anggaran paling tidak menggunakan 5 (lima) indikator penganggaran daerah, antara lain;

1. **Efisiensi** anggaran; Apakah pembelanjaan anggaran benar-benar memperhitungkan nilai harga yang tepat sesuai kuantitas dan kualitas barang, jasa, dan modal yang diperlukan dalam penyelenggaraan program atau kegiatan pemerintahan daerah?
2. **Efektifitas** anggaran; Apakah anggaran yang dibelanjakan benar-benar mampu mencapai hasil yang ditargetkan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan daerah?
3. **Ekonomisasi** anggaran; Apakah pengelolaan anggaran mampu mendorong perolehan barang dan jasa dengan penghematan anggaran tanpa mengurangi kualitas dan kuantitas barang, jasa dan modal yang diperlukan?

- Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak
4. **Keadilan** anggaran; Apakah alokasi atau distribusi anggaran telah diberikan kepada pihak-pihak yang membutuhkan secara adil sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing?
  5. **Hukum** anggaran; Apakah penganggaran daerah mematuhi peraturan hukum yang berlaku.

Beberapa catatan atas Pertanggungjawaban APBD berikut ini, merupakan hasil kajian singkat atas LPP APBD tahun 2017 yang didasarkan pada pengukuran ketercapaian atas tujuan umum laporan keuangan daerah, yaitu bagaimana menyajikan informasi mengenai **Posisi Keuangan, Realisasi Anggaran, Negera dan Saldo Anggaran Lebih**. Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak mengapresiasi kami sampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Demak atas hasil auditor BPK memberi opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), dengan dapat diraihinya opini WTP tersebut menunjukkan bahwa salah satu indikator pengelolaan keuangan daerah yang baik sudah terpenuhi, yaitu secara administrasi pelaporan keuangan sudah sesuai Standar, artinya pengelolaan keuangan daerah secara administrasi dapat dipertanggungjawabkan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Namun demikian dari LHP BPK tersebut masih terdapat beberapa catatan dan temuan yang perlu di tindaklanjuti guna perbaikan dan penyempurnaan manajemen keuangan daerah, oleh karena itu Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak menyampaikan beberapa masukan, saran dan pertanyaan-pertanyaan antara lain:

1. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah oleh sekolah di Kabupaten Demak belum sesuai ketentuan yang mengakibatkan kelebihan realisasi belanja honorarium dari porsi yang ditentukan sebesar Rp. 205.164.096,00 dan indikasi kerugian daerah atas realisasi belanja sebesar Rp.58.508.899,00, mohon penjelasan !
2. Bagaimana bisa terjadi kelebihan pembayaran atas 13 Paket Pekerjaan pada tiga Organisasi Perangkat Daerah sebesar Rp.555.888.759,78, mohon penjelasan ?
3. Penatausahaan Pemungutan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan tidak memadai dan penyajian Piutang Retribusi tidak akurat

mengakibatkan realisasi Pendapatan Retribusi sebesar Rp.212.920.120,00 tidak diyakini kewajarannya, mohon penjelasan !

4. Kelemahan penganggaran dan pengelolaan Belanja Modal atas barang-barang yang diserahkan kepada Pihak Ketiga mengakibatkan realisasi Belanja Modal sebesar Rp.101.382.573.000,00 tidak menggambarkan nilai belanja yang sebenarnya dan berpotensi tidak sinkron dengan rencana pembangunan pemerintah Kabupaten Demak.

Belanja apa saja yang menimbulkan tidak sinkronnya dengan rencana pembangunan pemerintah Kabupaten Demak, mohon penjelasan !

5. Penilaian penatausahaan serta pengamanan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Demak belum memadai mengakibatkan luas tanah di bawah jalan tidak akurat, Aset Tetap Gedung sebesar Rp.637.565.800,00 dan Aset Tetap sebanyak 2.485 item bernilai nol rupiah tidak diyakini kewajarannya serta potensi klaim oleh pihak ketiga atas Aset Tetap Tanah dan Aset Tetap kendaraan dinas yang belum memiliki bukti kepemilikan, mohon penjelasan terkait aset tetap sebanyak 2.485 item bernilai nol rupiah !
6. Penatausahaan Aset Tetap berupa pasar yang dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga pada Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah belum memadai mengakibatkan saldo Aset lainnya minimal sebesar Rp.116.320.000,00 tidak diyakini kewajarannya serta potensi timbulnya permasalahan status tanah dan bangunan yang diperjanjikan, mohon penjelasan !
7. Mohon penjelasan terkait dengan arus kas bersih dari investasi minus sebesar Rp.474.058.575.949,00 !
8. Pendapatan Rp.2.052.162.981.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.060.864.280.423,00, belanja Rp.2.102.304.338.000,00 dan realisasi Rp.1.986.479.116.398,00, sedangkan SILPA sebesar Rp.124.548.512.850,00, saldo anggaran lebih akhir tahun 2017 dicatat sebagai penerimaan pembiayaan tahun berikutnya. Dari SilPA tersebut berapa yang sudah terikat penggunaannya dan berapa yang belum terikat penggunaannya, sehingga dapat secara bebas untuk membiayai kegiatan tahun berikutnya ?

### ***Hadirin Peserta Rapat yang berbahagia;***

### **Kesimpulan Dan Saran :**

Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 merupakan salah satu bentuk akuntabilitas publik

(pertanggungjawaban kepala daerah kepada masyarakat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) oleh Pemerintahan Daerah. Di dalam proses pembahasannya DPRD Kabupaten Demak mendasarkan pada RKPD, KUA PPAS dan APBD baik sebelum perubahan maupun setelah perubahannya. Disamping itu juga memanfaatkan temuan dan rekomendasi Laporan Hasil audit BPK atas LKPD Pemerintah Daerah Demak tahun 2017.

Dalam kerangka tersebut, sebagaimana hasil analisis atas sejumlah komponen krusial Rancangan peraturan daerah Kabupaten Demak tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut;

1. Berdasarkan capaian pendapatan tahun 2017 yang melampaui target, tentu patut diapresiasi, Untuk itu disarankan agar pemerintah daerah terus melanjutkan kebijakan peningkatan kapasitas fiskal daerah yang terbukti efektif bahwa kebijakan tersebut berhasil meningkatkan pendapatan daerah, tentu setelah melalui evaluasi kebijakan peningkatan pendapatan daerah tahun 2017 yang menyeluruh, meninjau ulang kebijakan pendapatan dan kebijakan belanja yang tidak berpengaruh langsung terhadap meningkatnya kemampuan keuangan daerah serta efisiensi dan efektifitas anggaran.
2. Penyusunan kebijakan keuangan daerah setiap tahunnya hendaknya lebih fokus berkaitan dengan kebutuhan/permasalahan tahunan daerah serta selalu mengacu pada kebijakan keuangan dalam RPJMD.
3. Meningkatnya penerimaan dari Pajak dan Retribusi Daerah hendaknya dikaitkan dengan pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi. Tentu konsekuensinya harus sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
4. Berbagai upaya/kegiatan yang bertujuan untuk peningkatan pendapatan daerah yang layak untuk implementasikan kembali adalah:
  - a. Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
  - b. Intensifikasi dan ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Wilayah Kab. Demak;
  - c. Optimalisasi Pendataan Wajib Pajak, Pengadaan dan Penertiban Reklame;

- d. Peningkatan Kinerja dalam Penyusunan Tertib Administrasi Pembukuan Pendapatan Daerah;
  - e. Koordinasi, Evaluasi Realisasi dan Potensi Penerimaan dengan SKPD Penghasil;
  - f. Peningkatan Pengawasan terhadap Kesadaran Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Daerah;
  - g. Sosialisasi Pajak Daerah; dan Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah;
  - h. Optimalisasi Pengawasan Legalisasi Surat-surat berharga;
  - i. Pengelolaan Informasi Pendapatan Daerah, Updeting dan Analisa Data Statistik Penerimaan Daerah;
  - j. Pemutakhiran, Pendataan, Perekaman dan Pemetaan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);
  - k. Peningkatan kinerja dalam Pengelolaan Pendapatan Daerah Bidang Penagihan piutang daerah;
  - l. Apresiasi terhadap Wajib Pajak Taat Pajak; Bulan Panutan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Sinkronisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah.
5. Untuk meningkatkan tingkat serapan anggaran, sehingga berujung pada optimalisasi fungsi-fungsi anggaran khususnya di sektor pelayanan publik, maka dipandang penting dalam pengelolaan anggaran di masa mendatang untuk
- a. Memperkuat komitmen manajemen belanja dan perencanaan anggaran yang tepat waktu dan taat azas dari tingkat SKPD maupun UPT,
  - b. Meningkatkan efektifitas hasil monitoring dan evaluasi serapan anggaran, pemberian insentif dan disinsentif, baik terhadap SKPD maupun individu aparatur pelaksana.
  - c. Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah, khususnya berkenaan dengan pelaksana teknis pengelolaan anggaran daerah.
6. Tingkat realisasi belanja tahun 2017 dipandang belum secara optimal mampu menyediakan barang dan jasa publik, serta memenuhi kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Demak. Sehingga diperlukan tata kelola keuangan daerah yang dinamis dan terjadwal guna mempercepat proses pembangunan dan memacu tingkat pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk itu, **Sekretaris Daerah** bersama **DPKAD** Kabupaten Demak hendaknya melakukan intensifikasi monitoring dan evaluasi pola penyerapan anggaran belanja secara periodik, baik secara makro maupun di setiap SKPD yang seringkali mengalami problem realisasi rendah di awal tahun dan menumpuk di akhir tahun anggaran. Untuk itu

Pandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak

patut dipertimbangkan penggunaan sistem aplikasi ***e monitoring*** sehingga Tim anggaran pemda dan DPRD dapat mengontrol serapan anggaran setiap saat melalui sistem tersebut.

7. Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah pusat/daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Berdasarkan pemahaman atas jenis belanja dan tingkat serapan anggaran belanja operasi dalam APBD Kab. Demak Tahun 2017 di atas, untuk itu di masa yang akan datang perlu dilakukan peningkatan komitmen manajemen dan perencanaan Belanja Operasi agar dicapai efisiensi anggaran dan peningkatan alokasi untuk sektor publik yang lebih produktif bagi pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten. Demak.

### ***Hadirin Peserta Rapat yang berbahagia;***

#### **Rekomendasi :**

Dari temuan tersebut di atas Fraksi PDI Perjuangan melihat pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2017, oleh karena itu Fraksi PDI Perjuangan merekomendasikan agar:

1. Pemerintah Kabupaten Demak untuk melaksanakan dengan serta merta seluruh rekomendasi BPK atas temuan pengujian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang direkap kembali seperti tersebut diatas.
2. DPRD akan memantau dengan ketat atas progress tindak lanjut dari seluruh rekomendasi BPK baik yang sudah selesai, sedang dilaksanakan maupun yang belum dilaksanakan dalam rapat berkala dengan tim pemerintah daerah yang dibentuk untuk hal ini.
3. Mengungkap faktor-faktor penyebab atas temuan-temuan BPK RI dari sisi; kapasitas SDM Demak Tata manajemen, kememadaian sistem/prosedur sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
4. Mengungkap implikasi lebih lanjut atas temuan-temuan LHP BPK 2016 dari aspek;
  - a) Kerugian Daerah
  - a) Potensi Kerugian
  - b) Kekurangan Penerimaan
  - c) Administrasi
  - d) Ketidakhematan

e) Ketidakefisienan

f) Ketidakefektifan

5. Dari berbagai temuan BPK pada 2 dokumen hasil audit atas laporan keuangan Kabupaten Demak tahun 2017. Dapat disimpulkan bahwa opini Wajar dengan Pengecualian tersebut terutama disebabkan oleh karena Sistem pengendalian intern yang masih lemah dan beberapa pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang – undangan.
6. Terhadap LHP BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017, maka seyogyanya Pemerintah Kabupaten Demak melakukan kerjasama yang sistematis, terencana, dan terukur dengan DPRD Kabupaten Demak untuk:
  - a. Menyusun Rencana Tindak Lanjut yang berisi Kebijakan, Program, maupun kegiatan, untuk secepatnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan melaksanakan rekomendasi LHP BPK Tahun 2017.
  - b. Menjalankan fungsi pengawasan DPRD untuk memastikan bahwa seluruh rekomendasi dari BPK atas LKPD tahun 2017 di tindak lanjuti oleh pemerintah daerah.
  - c. Menggunakan rekomendasi BPK khususnya temuan dan rekomendasi atas Sistem Pengendalian Intern dalam pembahasan Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2017, agar sistem pengendalian intern pengelolaan keuangan daerah kabupaten Demak semakin handal.
  - d. Mengungkap faktor-faktor penyebab atas temuan-temuan BPK RI dari sisi; kapasitas SDM Pemkab Demak, Tata manajemen, kememadaian sistem/prosedur sesuai **Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**.
  - e. Untuk memperkuat **Sistem pengendalian intern** Pemerintah daerah hendaknya segera mengidentifikasi seluruh kelemahan pada aktifitas penatausahaan keuangan daerah, dan memperbaikinya dengan kebijakan baru yang dapat dituangkan dalam peraturan Bupati tentang kebijakan akuntansi daerah sesuai dengan saran/rekomendasi BPK, tentu setelah terlebih dahulu dilakukan analisis atas berbagai kelemahan penatausahaan keuangan daerah tersebut agar diketahui apa yang menjadi penyebabnya.
  - f. Melakukan perbaikan mekanisme proses akuntansi secara terstruktur dan sistematis, serta melakukan evaluasi penggunaan aplikasi penatausahaan keuangan secara periodik, disarankan untuk didampingi dengan tenaga ahli.

- g. Penerapan secara memadai dan menyeluruh sistem akuntansi berbasis akrual dengan kontrol yang ketat, sehingga menghasilkan output LKPD (Laporan keuangan pemerintah daerah) yang memadai berdasarkan SAP dan berbasis akrual. Karena sistem akrual basis ini merupakan hal baru, maka disarankan DPPKA tidak sekedar melakukan sosialisasi dan Bimtek saja akan tetapi juga membuka klinik penyusunan laporan keuangan dan akuntansi berbasis akrual bagi SKPD lain dengan bantuan tenaga ahli.

**Hadirin Peserta Rapat yang berbahagia;**

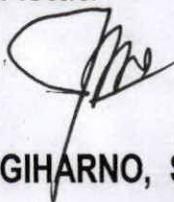
Demikian pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dengan harapan mendapat perhatian dan tanggapan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Amien. Terimakasih.

**Wassalamu'alaikum Wr. Wb.  
Merdeka !!!**

Demak, 6 Juli 2018

**FRAKSI PDI PERJUANGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DEMAK**

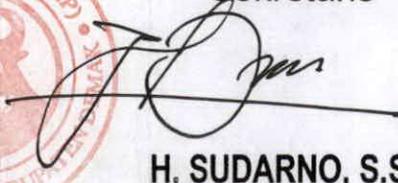
Ketua



**H. SUGIHARNO, SP**



Sekretaris



**H. SUDARNO, S.Sos.**

**PEMANDANGAN UMUM**

**FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA  
ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2017**



**PADA RAPAT PARIPURNA DPRD  
KABUPATEN DEMAK  
JUM'AT, 6 JULI 2018**

## PANDANGAN UMUM

### FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera ATAS LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2017

**Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh**

Alhamdulillah, ash sholatu wassalamu 'ala Rasulillah SAW

Yang terhormat Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Demak;

Yang Terhormat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak;

Yang terhormat Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten  
Demak;

Yang terhormat Forkompinda atau yang mewakili

Yang terhormat Para Staff Ahli Bupati dan Asisten Sekretaris Daerah;

Yang terhormat Kepala Badan / Dinas / Instansi / Bagian / Camat dan rekan  
media serta hadirin sekalian yang berbahagia.

*Alhamdulillah*, Segala puji bagi Allah *Azza wa Jalla*, atas berkat rahmat dan nikmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak Terhadap laporan Pertanggungjawaban Bupati Atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *uswah hasanah* kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, semoga kita termasuk di dalamnya. Amin.

**Rapat Dewan Yang Terhormat,**

Ijinkan kami dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyampaikan Pemandangan Umum Terhadap **Pertanggungjawaban Bupati Atas Pelaksanaan APBD Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017** yang telah disampaikan oleh Saudara Bupati pada sidang paripurna yang lalu. Mengawali pandangan Umum fraksi ini, F-PKS ingin menegaskan bahwa Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) selain sebagai satu bentuk akuntabilitas kinerja pengelolaan keuangan Bupati dan Pemerintah Kabupaten Demak atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, sekaligus sebagai upaya untuk menerapkan prinsip transparansi dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pada dasarnya selain dari tugas dan kewajiban konstitusional LPP APBD Tahun 2017 juga merupakan aktualisasi prinsip kemitraan, antara pemerintah daerah dengan DPRD sebagai sesama unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Oleh karenanya kemitraan yang sejajar antara pemerintah daerah dan DPRD perlu di bina secara optimal dalam koridor saling asah dan saling isi dengan menjunjung nilai-nilai kebersamaan sesuai dengan fungsi, tugas dan peran kita masing-masing.

## **Rapat Dewan Yang Terhormat,**

Sesuai dengan agenda sidang yang sudah ditentukan, bahwa dalam kesempatan kali ini adalah Pembicaraan Tingkat 1 Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2017, Sesuai dengan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undangan nomor 9 tahun 2015, bahwa Pemerintah Daerah diwajibkan menyapaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Setelah kami melakukan pengkajian dan pendalaman, Fraksi PKS memiliki pandangan diantaranya sebagai berikut.

1. Memberikan Apresiasi kepada BUPATI yang berhasil mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengacualian) dua kali berturut turut dalam LHP BPK RI terhadap APBD TA 2016 dan 2017 dan Kami juga memberikan apresiasi sebesar-besarnya kepada semua pihak dan stakeholder yang telah bekerja keras.
2. FPKS belum melihat dan menerima dokumen LHP BPK RI (opini dan rekomendasi) menjadi bagian dari Raperda LPJ APBD Tahun Anggaran 2017. Mohon Penjelasan
3. Kami berharap segera menuntaskan tindak lanjut LHP BKP RI terhadap semua temuan dan rekomendasi BPK RI tahun 2017 dan temuan BPK RI 3 tahun terakhir. Yang kami pertanyakan :
  - a). Apakah sudah ada progrès untuk melaksanakan rekomendasi BPK RI tersebut di tahun-tahun sebelumnya?
  - b) FPKS meminta disetiap LPJ dilampirkan laporan tindak lanjut penyelesaian Rekomendasi LHP BPK di tahun sebelumnya.

c) Kami mengusulkan dibentuknya Tim Evaluasi dan Monitoring yang akan memantau rencana dan pelaksanaan terhadap rekomendasi LHP BPK

4. Dengan tercapainya predikat WTP dalam LHP BPK terhadap pelaksanaan APBD tahun 2017, maka Fraksi PKS mendorong dan mendukung semua pihak, agar dapat bekerja keras kembali dengan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mempertahankan Predikat WTP pada LPJ APBD di tahun berikutnya.
5. Kita berharap Pemerintah Kabupaten Demak tidak berpuas diri dengan capaian WTP yang ke dua ini, kami berharap lebih dari pada itu agar Pemerintah juga fokus kepada Audit kepatuhan (compliance audit) dan Audit kinerja (performance audit). WTP dalam Audit Keuangan tidaklah cukup, karena sebagai lembaga pemerintah yang melayani kepentingan publik, Audit harus mencakup tiga hal, yaitu audit keuangan, audit kepatuhan dan audit kinerja. Audit kepatuhan dan Audit Kinerja adalah Audit yang lebih dalam dibandingkan dengan Audit Keuangan. Audit kepatuhan adalah audit yang menilai kesesuaian pengeluaran pemerintah dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan Audit kinerja adalah perluasan dari Audit Keuangan, dimana lebih memfokuskan pada tujuan pengeluaran yang meliputi audit ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Sehingga dengan ketiga Audit ini kita dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan yang bagus yang tercermin dalam predikat WTP juga berdampak pada dampak kepada publik yang akan nampak dalam Audit kepatuhan dan Audit kinerja tersebut.

**Rapat Dewan Yang Terhormat,**

Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi Partai Keadilan Sejahtera atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017. FPKS meminta Saudara Bupati dapat menindaklanjuti dan memberikan penjelasan yang lebih *clear*, objektif dan argumentative. Sehingga laporan realisasi APBD ini memiliki bobot objektivitas, akuntabilitas dan transparansi yang tinggi dihadapan masyarakat Kabupaten Demak.

*Billahi taufiq wal hidayah. Ihdinash shirothol mustaqim.*

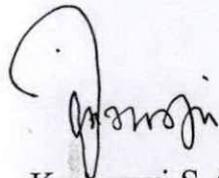
*Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh*

Sekian dan terima kasih

Demak, 6 Juli 2018

FRAKSI PKS

Kabupaten Demak.



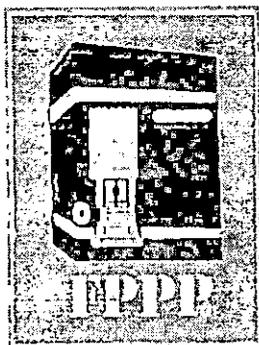
Kamzawi S, Ag

Ketua



Suhadi

Sekretaris



PEMANDANGAN UMUM  
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DPRD KABUPATEN DEMAK  
TERHADAP  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN 2017

\*\*\*

Disampaikan oleh : H. SABIQ HAMBALI

JUMAT, 6 JULI 2018

**PEMANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**  
**DPRD KABUPATEN DEMAK**  
**TERHADAP**  
**LAPORAN PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAAN**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN DEMAK**  
**TAHUN 2017**

---

Assalamualaikum wr. wb.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

أَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ , وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰی اِمَامِ الْاَنْبِیَا -  
وَالْمُرْسَلِیْنَ , سَیِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ وَمَنْ -  
تَبِعَهُمْ بِاِحْسَانٍ اِلٰی یَوْمِ الدِّیْنِ , اَمَّا بَعْدُ :-

Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak

Yth. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak

Yth. Saudara Anggota Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri  
Demak

Yth. Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan

Yth. Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Dinas, Instansi, Bagian dan para Camat se- Kabupaten Demak.

Segenap Undangan dan hadirin yang kami hormati.

Dalam kesempatan yang baik ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rohmat, taufiq dan hidayah Nya, sehingga pada hari ini,

Jumat, 6 Juli 2018 kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017.

Sholawat dan Salam, senantiasa kita sampaikan kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Rosul yang mulia, yang menyampaikan kebenaran, menuju keselamatan Umat manusia didunia dan diakhirah. Semoga kita mendapat syafa'atnya, Aamiin.

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Ketua Dewan selaku Pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan kepada kami,

guna menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan terhadap LPP APBD Kab, Demak Tahun 2017.

Hadirin Rapat Dewan yang Kami hormati,

Bahwa Laporan Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 beserta Perubahan-Perubahannya adalah melaksanakan amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang –Undang Nomor 9 Tahun 2015 ,dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan juga Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 telah di ubah terakhir dengan Permendagri No 21 Tahun 2011 ,di Konversi dengan PP Nomor 71 Tahun 2010. Kepala Daerah berkewajiban Menyampaikan Rancangan LPP APBD kepada DPRD Paling lambat 6(enam) Bulan setelah Tahun Anggaran berakhir. Laporan tersebut di sampaikan setelah di periksa oleh BPK.

Hadirin Rapat Dewan yang kami hormati,

Fraksi PPP DPRD Kabupaten Demak menyampaikan beberapa hal pendapat, saran, masukan serta pertanyaan tentang Ranperda tersebut sebagai berikut :

1. Fraksi PPP DPRD Kabupaten Demak menyampaikan Apresiasi yang setinggi –tingginya kepada Pemerintah Kabupaten Demak atas tercapainya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), terhadap LPP APBD Kabupaten Demak Tahun 2017 . Adapun Prestasi tersebut harus bisa di pertahankan untuk tahun berikutnya dengan tidak meninggalkan permasalahan –permasalahan di Pemerintahan maupun yang ada di Masyarakat Kabupaten Demak bagaimana upaya ini bisa tercapai , Mohon penjelasan ?
2. Berkaitan dengan target pemerintah Kab. Demak mengenai APBD Tahun 2017 adalah sebesar Rp.2.052.162.981.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.2.060.864.280.423.00 atau sebesar 100,42% yaitu meningkat Rp. 108.404.358.223,00.

Adapun Belanja APBD Kabupaten Demak terserap Rp.94 ,49 % atau terealisasi sebesar Rp.1.986.479.116.398,00 mengalami penurunan di banding Tahun 2016 . maka dari itu perlu sebuah

perencanaan yang maksimal dan perlu evaluasi pada tingkat – OPD secara detail dan tuntas setiap kendala dan permasalahan yang timbul sehingga ada solusi dan tindak lanjut yang efektif .

Mohon Penjelasan ?

3. Berkaitan Belanja tidak terduga APBD 2017 hanya terealisasi 4,6% . Dan bagaimana penanganan daerah yang terkena Rob terutama wilayah Kec.Sayung dan Karang Tengah Mohon penjelasan ?
4. Belanja Hibah kepada Masyarakat untuk APBD Tahun 2017 masih Sangat minim termasuk juga untuk sekolah –sekolah swasta Ponpes, Madin dan lainnya , kami berpendat bahwa seharusnya pemerintah kabupaten membuat kebijakan daerah untuk hal tersebut sehingga APBD memenuhi unsur keadilan ,begitu juga untuk Anggaran hibah pada Tahun ini agar terealisasi dengan baik.
5. Pemerintah Perlu inovatif lagi berkaitan pengembangan BUMD , sehingga berkembang antara lain perluasan jaringan Air minum untuk di kembangkan sampai ke beberapa Desa di Kecamatan – Kecamatan yang belum ada, sekaligus ini juga dapat menambah PAD Kab . Demak.

6. Program infrastruktur terutama untuk pelebaran jalan adalah sebuah kebutuhan untuk Kabupaten Demak dan sampai saat ini masih menyisakan PR/tugas untuk segera di tindak lanjutnya, antara lain Jalan Wono kerto Tambak bulusan di tambak bulusan kecamatan Karang tengah . juga Perlu Pelebaran Jalur Alternatif Buyaran Genuk Lewat Ds Sampang , Tangkis ,Gaji Jalan tersebut dan lainnya perlu segera di lebarkan Mohon penjelasan
7. Mengenai Prolegda Kabupaten Demak Pada Tahun 2017 masih perlu di tingkatkan kembali sehingga mencapai target yang di inginkan.

Hadirin Rapat Dewan yang kami hormati.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak terhadap Laporan Pertanggung Jawaban Pemerintah Daerah tentang Laporan Pelaksanaan APBD Tahun 2017 , kemudian apabila ada kehilafan dan kesalahan mohon ma'af yang sebesar-besarnya, atas perhatian dan kerjasama semua pihak kami sampaikan terima kasih,

semoga Demak semakin maju, aman, dan Sejahtera dibawah lindungan Allah SWT, Aamiin.

Walloohul muwaafiq ilaa aqwamith thoriiq

Wassalamualaikum wr. wb.

Demak, 6 Juli 2018

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN  
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**KETUA**

**SEKRETARIS**

( ABU SAID, S.Pd.I )

( H. ROZIKHAN ANWAR, SH )

**PANDANGAN UMUM**  
**FRAKSI AMANAT DEMOKRASI**  
**ATAS**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN**  
**PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**  
**KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2017**



**DEMAK, 6 JULI 2018**

Assalamu'laikum Wr. Wb

- Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak
- Yang kami hormati Ketua, Wakil ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Demak
- Yang kami hormati FORKOMPINDA, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Demak atau yang mewakili.
- Yang kami hormati Sekda dan Sekwan Kabupaten Demak
- Yang kami hormati Staf Ahli Bupati dan para Asisten Sekda Kabupaten Demak
- Yang kami hormati Kepala Dinas, Badan, dan Instansi sekabupaten Demak
- Yang kami hormati Camat sekabupaten Demak
- Yang kami hormati Tamu undangan dan teman-teman mass media baik cetak maupun elektronika di Kab. Demak

- Mengawali pandangan umum ini, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan Puji Syukur kepada Allah SWT, Tuhan penguasa alam semesta dimana sampai saat ini kita masih menerima Taufik dan Hidayah-NYA sehingga kita masih dapat menghadiri Rapat Paripurna Siang ini.
- Sholatullah wa salamullah semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang Insya Allah dengan Ridha Allah besok akan memberi syafaat kepada kita semua, Amin.

- Selanjutnya kami ucapkan Terimakasih kepada Pimpinan Rapat yang sudah memberi waktu kepada Fraksi Amanat Demokrasi untuk menyampaikan Pandangan Umum, atas  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN  
DEMAK TAHUN ANGGARAN 2017

Pimpinan Sidang, Bupati dan Wakil Bupati Yang berbahagia....

Sebelum menyampaikan Pandangan Umum ini, Fraksi Amanat Demokrasi memberi apresiasi kepada, Pemkab Demak atas meningkatnya Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 sebesar Rp. 309.614.748.737 dari asumsi Rp. 283.670.449.000.

Peningkatan ini merupakan hasil kerja keras dari OPD-OPD Kabupaten Demak.

Semoga ke depan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah selalu meningkat jumlahnya, namun jangan sampai membebani masyarakat Kabupaten Demak.

Fraksi Amanat Demokrasi Memberi Apresisai kepada OPD yang telah melaksanakan Anggaran APBD Tahun 2017 yang input, output dan outcamnya selaras dan bermanfaat besar bagi masyarakat Demak

Pimpinan Sidang, Bupati dan Wakil Bupati Yang berbahagia.....

Ijinkanlah Fraksi Amanat Demokrasi Menyampaikan Saran, Pertanyaan

PERTANYAAN :

1. Di buku Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017, pada Pasal 2 tertulis :

Pendapatan....Rp. 2.060.864.280.423

Belanja.....Rp. 1.655.418.381.539

Surplus Rp. 74.385.164.025.

Kenapa terjadi penulisan seperti ini?

Bila belanja sebesar Rp. 1.655.418.381.539 maka seharusnya surplus adalah Rp. 405.445.898.884

Manakah surplus yang betul? Mohon Penjelasan.

2. Kenapa Penulisan Nominal Angka dalam Rancangan Perda dan Rancangan Perbup tentang Perolehan Denda Pajak PBB tidak sama?

Di Rancangan Perda Tertulis Rp. 160.000.000. terealisasi

Rp. 355.442.856

Sedangkan di Rancangan Perbup tertulis Rp. 160.000.000 terealisasi sebesar Rp. 351.742.446. Mohon Penjelasan

3. Dalam buku Rancangan Peraturan Bupati di halaman 1335, 1336, 1337 yang berkaitan dengan pencatatan Pendapatan Asli Daerah tidak mencatat atau memasukkan Retribusi Daerah yang nilainya terealisasi di buku lain sebesar Rp. 21.053.350.530 padahal ini bisa mempengaruhi jumlah PAD pada hal tersebut.

Mohon Penjelasan

4. Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak Penerangan Jalan yang diasumsikan sebesar Rp. 42.500.000.000 dan terealisasi sebesar Rp. 45.661.911.858. sehingga ada kenaikan sebesar Rp. 3.161.911.858

Kenaikan pendapatan ini merupakan pembayaran konsumen listrik yang sangat dipengaruhi oleh kenaikan Tarif Dasar Listrik.

Untuk itu perlu kiranya Pemkab menggunakan atau membelanjakan secara efektif, selektif dan efisien.

Namun kenyataannya Pemkab masih melakukan pemborosan di bidang Penggunaan Penerangan Lampu Jalan.

Ini terbukti masih menyalnya dua jenis lampu jalan (lampu lama berwarna kuning dan lampu pengganti berwarna cerah) dari Dukuh Bogomalang Desa Bakung sampai depan Kantor Eks Kawedanan Mijen. Yang jumlahnya kurang lebih ada 22 titik

Kenapa hal ini terjadi? Mohon penjelasan

Pimpinan Sidang, Bupati dan Wakil Bupati Yang berbahagia.....

Sampailah saatnya Fraksi Amanat Demokrasi menyampaikan saran.

1. Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari Pajak BPHTB naik sangat signifikan sekali, sebesar 80,40 % atau Rp. 12.863.321.631. Fraksi Amanat Demokrasi berpendapat kenaikan sebesar ini banyak yang berasal dari Pajak BPHTB dari Perusahaan-Perusahaan atau Industri. Dari sektor perumahan atau masyarakat nominalnya masih kecil, ini dikarenakan Pajak BPHTB yang dasar penghitungannya dari NJOP. Namun sistem perhitungannya kenaikan di nilai NJOP belum ada ketentuan yang pasti, sehingga ada NJOP yang naiknya 100 – 200%. Hal ini sangat memberatkan bagi masyarakat kecil dalam membayar Pajak BPHTB. Sebenarnya dengan membayar Pajak BPHTB akan memberi keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat

yang ingin memiliki tanah atas nama sendiri, dan mencegah timbulnya gugatan dari penjual.

Mohon Saudara Bupati untuk melakukan klasifikasi tanah yang berkaitan dengan Pajak BPHTB, jangan sampai ada PASAL GREGETEN dan AYAT AJI MUMPUNG.

2. Berkaitan dengan naiknya Tarif PDAM yang berlaku mulai Bulan April 2018 banyak masyarakat yang merasa keberatan. Dikarenakan kewajiban dan pelayanan PDAM terhadap pelanggan masih dirasa kurang, baik berkaitan dengan kualitas air dan pelayanan lain, maka kenaikan tarif PDAM perlu ditinjau kembali.

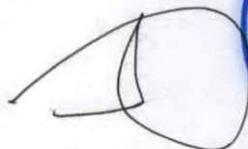
Demikian Pandangan Umum dari Fraksi Amanat Demokrasi atas  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK  
TAHUN ANGGARAN 2017

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Demak, 6 Juli 2018

Ketua



Fatkhan, S.H.



Sekretaris



H. Farodli, S.Pdi